

**PRAKTIK TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI
NEGERI BERBADAN HUKUM (PTNBH)**
(Studi Kasus pada PTNBH)

TESIS

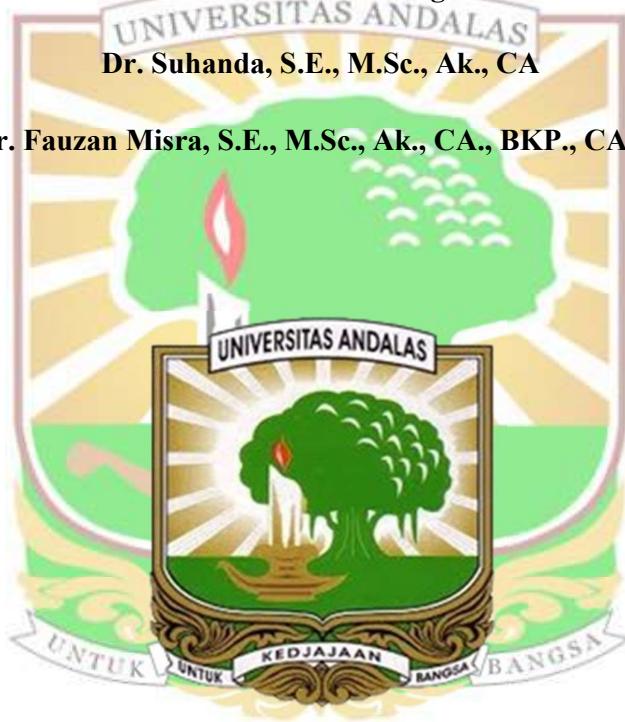
Fathir Aulia Bufi

2320531008

Dosen Pembimbing

Dr. Suhanda, S.E., M.Sc., Ak., CA

Dr. Fauzan Misra, S.E., M.Sc., Ak., CA., BKP., CACP



**PROGRAM MAGISTER DAN DOKTOR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

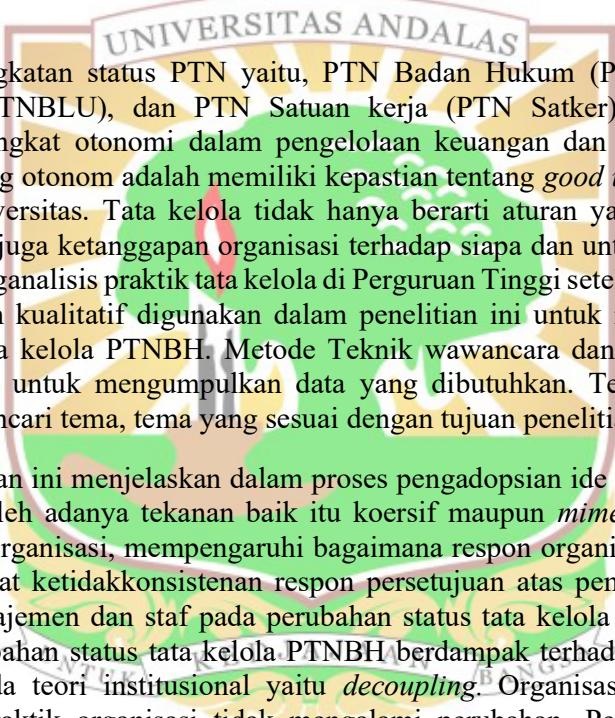
2024

ABSTRAK

PRAKTIK TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI NEGERI BERBADAN HUKUM (PTNBH) *(Studi Kasus pada PTNBH)*

Oleh: Fathir Aulia Bufl (2320531008)
Magister Akuntansi, Universitas Andalas

Dosen Pembimbing:
Dr. Suhanda, SE, M. Si, Ak, CA
Dr. Fauzan Misra, S.E., M.Si., Ak., CA., BKP., CACP



Ada tiga tingkatan status PTN yaitu, PTN Badan Hukum (PTNBH), PTN Badan Layanan Umum (PTNBLU), dan PTN Satuan kerja (PTN Satker). Tingkatan tersebut berdasarkan pada tingkat otonomi dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya. Syarat perguruan tinggi yang otonom adalah memiliki kepastian tentang *good university governance* atau tata kelola universitas. Tata kelola tidak hanya berarti aturan yang ditorehkan secara kelembagaan, tetapi juga ketanggapan organisasi terhadap siapa dan untuk apa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik tata kelola di Perguruan Tinggi setelah ditetapkan sebagai PTNBH. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk memahami fenomena yang terjadi atas tata kelola PTNBH. Metode Teknik wawancara dan observasi digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. Teknis analisis tematik digunakan untuk mencari tema, tema yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Pada penelitian ini menjelaskan dalam proses pengadopsian ide PTNBH di Perguruan Tinggi didasarkan oleh adanya tekanan baik itu koersif maupun *mimetic*. Berbagai konflik kepentingan dalam organisasi, mempengaruhi bagaimana respon organisasi terhadap tekanan institusional. Terdapat ketidakkonsistensi respon persetujuan atas pemenuhan tekanan atas perilaku antara manajemen dan staf pada perubahan status tata kelola PTNBH. Pemenuhan legitimasi atas perubahan status tata kelola PTNBH berdampak terhadap praktik tata kelola yang dijelaskan pada teori institusional yaitu *decoupling*. Organisasi memenuhi tekanan eksternal, namun praktik organisasi tidak mengalami perubahan. Perguruan Tinggi yang sedang menjalankan perubahan status menjadi PTNBH diperlukannya komitmen Pimpinan Universitas dalam menetapkan ide PTNBH di Perguruan Tinggi. Pimpinan Perguruan Tinggi berpengaruh secara krusial dan berperan penting dalam menentukan terjadinya *decoupling*, peran pimpinan universitas dalam proses penetapan ide PTNBH tidak cukup hanya pada level pimpinan saja akan tetapi seluruh lapisan universitas. Selain itu, perubahan PTN menjadi PTNBH dituntut untuk dapat membentuk regulasi internal PTNBH dalam menjalankan otonomi yang diberikan oleh Pemerintah guna untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Kata Kunci: GUG, PTNBH, Tekanan Koersif, Tekanan *Mimetic*, dan *Decoupling*

ABSTRACT

HIGHER EDUCATION GOVERNANCE PRACTICES LEGAL ENTITY STATE (PTNBH) (Case Study on PTNBH)

*By: Fathir Aulia Bufl (2320531008)
Magister of Accounting, Andalas University*

Thesis Advisor:

Dr. Suhanda, SE, M. Si, Ak, CA

Dr. Fauzan Misra, S.E., M.Si., Ak., CA., BKP., CACP



There are three levels of PTN status, namely, PTN Legal Entity (PTNBH), PTN Public Service Agency (PTNBLU), and PTN Work Unit (PTN Satker). The level is based on the level of autonomy in financial and resource management. The requirement for autonomous universities is to have certainty about good university governance. Governance not only means rules that are inscribed institutionally, but also the organization's responsiveness to who and for what. This study aims to analyze governance practices in higher education after being designated as PTNBH. A qualitative approach is used in this study to understand the phenomenon that occurs in the governance of PTNBH. Methods: Interview and observation techniques are used in this study to collect the required data. Thematic analysis techniques are used to search for themes, themes that are in accordance with the research objectives.

This study explains that the process of adopting the idea of PTNBH in Higher Education is based on pressure, both coercive and mimetic. Various conflicts of interest in the organization, affecting how the organization responds to institutional pressure. There is an inconsistency in the response to approval of the fulfillment of pressure on behavior between management and staff on changes in the governance status of PTNBH. The fulfillment of legitimacy for changes in the governance status of PTNBH has an impact on governance practices explained in the institutional theory, namely decoupling. Organizations meet external pressures, but organizational practices do not change. Universities that are undergoing a change in status to become PTNBH require the commitment of University Leaders in determining the idea of PTNBH in Higher Education. Higher education leaders are crucial and play an important role in determining the occurrence of decoupling, the role of university leaders in the determination process.

Keywords: GUG, PTNBH, Isomorfism Coersif, Isomorfism Mimetic, and Decoupling.